KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Kementerian Negara Segera Dibahas
Tanggal : Kamis, 05 September 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Revisi UU Kementerian Negara Segera Dibahas

PEMERINTAH telah menuntaskan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dua revisi undang-undang (UU), yaitu UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Dua revisi UU DIM-nya sudah selesai, yakni revisi UU Kementerian Negara sudah ada di DPR sekarang DIM-nya. Kemudian kemarin itu tentang Dewan Pertimbangan Presiden," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Supratman menambahkan, DIM untuk revisi UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres yang disusun pemerintah tidak jauh berbeda ketika berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Ya pada prinsipnya kurang lebih sama. Mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis, dengan mempertimbangkan anggaran dan sebagainya. Termasuk di Wantimpres juga," ujarnya.

Supratman juga mengatakan revisi UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga siap dibahas. Tiga revisi UU itu siap untuk dibahas di DPR dalam waktu dekat. "Sementara RUU Imigrasi masih dalam proses paraf. Mudah-mudahan ketiga revisi UU ini dalam waktu dekat ini bisa kita bahas di DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dewan telah menerima surat presiden tertanggal 2 Juli 2024 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU Kementerian Negara dan Imigrasi. DPR pun telah menyetujui agar revisi UU tersebut dibahas Baleg DPR. Produk legislasi ini nantinya menjadi dasar hukum pemerintahan baru bekerja selama lima tahun ke depan.

"Untuk itu, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR," kata Dasco saat memimpin Rapat Paripurna DPR, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara tingkat pertama tersebut akan dilakukan pada Senin (9/9) bersama pemerintah. "Iya kami jadwalkan Senin mendatang rapat kerja membahas ini bersama pemerintah," jelasnya.

Menurut Baidowi, DPR sebenarnya sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) setelah menerima surat presiden (surpres) pada 2 Juli lalu. Dalam rapat tersebut, Bamus kemudian memutuskan atau menugasi Baleg membahas revisi UU Kementerian Negara. "Ini sudah ditugaskan ke Bamus sejak lama, jadi bisa langsung jalan untuk dibahas," ucap dia.

Dengan telah ditetapkan jadwal tersebut maka DIM sudah disiapkan. "Sudah ada DIM-nya," imbuhnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh anggota Baleg Guspardi Gaus. Bamus telah menugaskan pembahasan revisi UU Kementerian Negara sejak dua bulan lalu. Dengan waktu yang tersisa itu Baleg harus *ngebut* membahasnya agar segera rampung. "Wah sudah lama itu ditugaskan oleh Bamus, jadi harus segera dirampungkan," ucapnya. (Ykb/Sru/Fah/P-3)